

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1996. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Candra Pratama, Jakarta
- Adami Chawawi, 2008. *Hukum Pembuntian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni, Bandung
- Ahmad Yani, 2004. *Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Divisi Buku Perguruan Tinggi. Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- Baharuddin Lopa dan Moch. Yamin. 1987. *Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi*. Alumni. Bandung.
- Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Hamid, Edi Sunandi dan Muhammad Suyuti (Penyunting), 1999. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marmosudjono, Sukarton, 1989. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005. *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Mubyarto, 1980. *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, Yayasan Agro Ekonomi, Jakarta
- Mustafa, Abdullah dan Ruben Ahmad, 1983. *Intisari Hukum Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Prp tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN 72 tahun 1960).

- Poernomo, 1983. Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1990 Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka Jakarta.
- Rahardjo, M. Dawam 1998, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kajian Konseptual dan sosio-kultur, Makalah Seminar Berajuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Tantangan Masa Depan Bangsa, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2002, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), BPHN, Jakarta.
- Syed Hussain Alatas, 1980. *The Sociology of Corruption, Times International*, Singapore.

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN. Nomor 8 Tahun 2004, TLN. Nomor 4358
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001.